

SKPD : 12201-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Periode : 31-12-2016366

Kode	Nama Rekening	Awal
1	ASET	548,785,445
11	ASET LANCAR	27,158,950
111	Kas dan Setara Kas	25,012,850
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,012,850
116	Beban Dibayar Dimuka	0
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0
117	Persediaan	2,146,100
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	2,146,100
11702	Persediaan Bahan/Material	0
11703	Persediaan Barang Lainnya	0
13	ASET TETAP	519,469,995
132	Peralatan dan Mesin	1,304,526,500
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	809,287,000
13214	Alat Kantor	33,175,000
13215	Alat Rumah Tangga	158,215,000
13216	Komputer	201,035,000
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	61,414,500
13218	Alat Studio	18,450,000
13219	Alat Komunikasi	21,450,000
13220	Peralatan Pemancar	1,500,000
133	Gedung dan Bangunan	434,000,000
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	434,000,000
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12,059,800
13421	Jaringan Listrik	1,284,800
13422	Jaringan Telepon	10,775,000
137	Akumulasi Penyusutan	1,231,116,305
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,007,731,875
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	221,720,000
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	1,664,430
15	ASET LAINNYA	2,156,500
153	Aset Tidak Berwujud	0
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	253,200,000
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	253,200,000
155	Aset Rusak	2,156,500
15501	Aset Rusak	113,449,500
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	111,293,000

## NERACA

Akhir	Kode	Nama Rekening
808,380,316	2	KEWAJIBAN
185,228,400	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
183,885,500	211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
183,885,500	212	Utang Bunga
0	213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
0	214	Pendapatan Diterima Dimuka
1,342,900	215	Utang Belanja
1,342,900	216	Utang Jangka Pendek Lainnya
0	22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0	221	Utang Dalam Negeri
620,995,416	222	Utang Jangka Panjang Lainnya
1,363,641,500	3	EKUITAS
809,287,000	31	EKUITAS
33,605,000	311	Ekuitas
163,700,000	312	Ekuitas SAL
245,010,000	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
70,639,500		
18,450,000		
21,450,000		
1,500,000		
616,275,000		
616,275,000		
12,059,800		
1,284,800		
10,775,000		
1,370,980,884		
1,138,717,393		
230,028,191		
2,235,300		
2,156,500		
0		
253,200,000		
253,200,000		
2,156,500		
113,449,500		
111,293,000		



### LAPORAN REALISASI ANGGARAN [SAP]

SKPD : 12201-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Periode : 13-03-201772

Kode	Nama Rekening	Anggaran
1	PENDAPATAN	0
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0
1.1.01	HASIL PAJAK DAERAH	0
1.1.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	0
1.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAH	0
1.1.04	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0
	PENDAPATAN TRANSFER	0
1.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0
1.2.01.1	BAGI HASIL PAJAK	0
1.2.01.2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM)	0
1.2.01.3	DANA ALOKASI UMUM	0
1.2.01.4	DANA ALOKASI KHUSUS	0
1.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0
1.2.02.1	DANA OTONOMI KHUSUS	0
1.2.02.2	DANA PENYESUAIAN	0
1.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	0
1.2.03.1	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	0
1.2.03.2	PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA	0
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0
1.3.01	PENDAPATAN HIBAH	0
1.3.02	PENDAPATAN DANA DARURAT	0
1.3.03	PENDAPATAN LAINNYA	0
	JUMLAH	0
2	BELANJA	5,631,808,050
2.1	BELANJA OPERASI	5,568,208,050
2.1.01	BELANJA PEGAWAI	3,001,250,200
2.1.02	BELANJA BARANG	2,566,957,850
2.1.03	BELANJA BUNGA	0
2.1.04	BELANJA SUBSIDI	0
2.1.05	BELANJA HIBAH	0
2.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
2.1.07	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	0
2.2	BELANJA MODAL	63,600,000
2.2.01	BELANJA TANAH	0
2.2.02	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	63,600,000
2.2.03	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	0
2.2.04	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0
2.2.05	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	0
2.2.06	BELANJA ASET LAINNYA	0
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0
2.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	0
2.4	TRANSFER	0
2.4.01	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0
2.4.01.1	BAGI HASIL PAJAK	0
2.4.01.2	BAGI HASIL RETRIBUSI	0

2.4.01.3	BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA	0
	JUMLAH	5,631,808,050
	SURPLUS (DEFISIT)	-5,631,808,050
3	PEMBIAYAAN	0
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0
3.1.01	PENGGUNAAN SILPA	0
3.1.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0
3.1.03	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0
3.1.04	PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT	0
3.1.05	PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH DAERAH LAIN	0
3.1.06	PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN BANK	0
3.1.07	PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN BUKA	0
3.1.08	PINJAMAN DALAM NEGERI - OBLIGASI	0
3.1.09	PINJAMAN DALAM NEGERI - LAINNYA	0
3.1.10	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN	0
3.1.11	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN	0
3.1.12	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH	0
3.1.13	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0
3.1.14	PENERIMAAN DARI PENGEMBALIAN BELANJA SKPD	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
3.2.01	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0
3.2.02	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH	0
3.2.03	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH	0
3.2.04	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH	0
3.2.05	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN	0
3.2.06	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN	0
3.2.07	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - OBLIGASI	0
3.2.08	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - LAINNYA	0
3.2.09	PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA	0
3.2.10	PEMBERIAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN	0
3.2.11	PEMBERIAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH	0
3.2.12	PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SEBELUM JATUH TEMPO	0
3.2.13	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0
	PEMBIAYAAN NETTO	0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-5,631,808,050





## Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD : 12201-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Periode : 31-12-2016366

Keterangan	Jumlah
Ekuitas Awal	487.445.245,00
Surplus Defisit LO	-5.182.160.311,35
Koreksi Kesaalahan dan Perubahan Kebijaka	-1.409.950,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	5.453.631.432,00
Ekuitas Akhir	757.506.415,65



### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SKPD : 12201-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Periode : 01-01-2016 s.d. 31-12-2016366

Kode	Nama Rekening	Anggaran
4	PENDAPATAN	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0
5	BELANJA DAERAH	5,631,808,050
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,523,235,200
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,523,235,200
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,108,572,850
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	478,015,000
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,566,957,850
5.2.3	BELANJA MODAL	63,600,000
	JUMLAH BELANJA	5,631,808,050
	SURPLUS (DEFISIT)	-5,631,808,050

Realisasi	Selisih	Prosentase (%)
0	0	0
0	0	0
5,288,181,382	-343,626,668	-6
2,421,805,197	-101,430,003	-4
2,421,805,197	-101,430,003	-4
2,866,376,185	-242,196,665	-8
439,406,500	-38,608,500	-8
2,366,444,685	-200,513,165	-8
60,525,000	-3,075,000	-5
5,288,181,382	-343,626,668	94
-5,288,181,382	343,626,668	94

## LAPORAN OPERASIONAL

SKPD : 12201-Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Periode : 31-12-2016366

Kode	Nama Rekening	Jumlah
	PENDAPATAN	0
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0
811	Pendapatan Pajak Daerah	0
812	Pendapatan Retribusi Daerah	0
81206	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
814	Lain-lain PAD Yang Sah	0
81	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0
82	PENDAPATAN TRANSFER	0
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0
82101	Bagi Hasil Pajak	0
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0
82103	Dana Alokasi Umum (DAU)	0
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0
8	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0
82201	Dana Otonomi Khusus	0
82202	Dana Keistimewaan	0
82203	Dana Penyesuaian	0
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0
82302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	0
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0
8	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA	0
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
831	Pendapatan Hibah	0
832	Dana Darurat	0
833	Pendapatan Lainnya	0
8	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0
8	JUMLAH PENDAPATAN	0
9	BEBAN	5,182,160,311
91	BEBAN OPERASI	5,182,160,311
911	Beban Pegawai	2,858,941,697
912	Beban Barang dan Jasa	2,183,354,035
913	Beban Bunga	0
915	Beban Hibah	0
916	Beban Bantuan Sosial	0
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	139,864,579
918	Beban Penyisihan Piutang	0
919	Beban Lain-lain	0
9	JUMLAH BEBAN OPERASI	5,182,160,311
92	BEBAN TRANSFER	0
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0

925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0
9	JUMLAH TRANSFER	5,182,160,311
9	JUMLAH BEBAN	5,182,160,311
X	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	-5,182,160,311
84	SURPLUS NON OPERASIONAL	0
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
X	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	0
93	DEFISIT NON OPERASIONAL	0
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
9	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	5,182,160,311
X	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0
8	POS LUAR BIASA	0
85	PENDAPATAN LUAR BIASA	0
851	Pendapatan Luar Biasa	0
8	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	0
94	BEBAN LUAR BIASA	0
941	Beban Luar Biasa	0
94	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0
9	JUMLAH POS LUAR BIASA	5,182,160,311
X	SURPLUS/DEFISIT LO	-5,182,160,311



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum**

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah Basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan

Dasar hukum akuntansi berbasis akrual adalah UU nomor 17 tahun 2003 di mana pada pasal 36 ayat (1) UU 17/2003 menyebutkan Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun dan pada pasal 70 ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 menyatakan batas waktu penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat tahun anggaran 2008.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
2. Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan OPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pembacanya, serta dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sedangkan manfaat penerapan basis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

## 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Temanggung nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Bupati Temanggung nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Indikator Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD
- BAB III : Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinpermades
- BAB IV : Kebijakan Akuntansi
- BAB V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- BAB VI : Penjelasan Informasi Non Keuangan
- BAB VII : Penutup

## **BAB II**

### **INDIKATOR EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA OPD**

#### **2.1 Indikator Ekonomi Makro**

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat, yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah PDRB, struktur PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, nilai investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan dengan pembenahan pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasidan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan menempatkan prioritas pengembangan pada :

- a. Sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Sektor-sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- c. Sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017, termasuk di dalamnya APBD Perubahan diarahkan pada kebijakan-kebijakan manajemen keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD**

Indikator kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan jembatan antara Perencanaan Strategis (PK) dan akuntabilitas.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2017 melalui APBD Tahun Anggaran 2016 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7.124.572.453,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.523.235.200 2.715.071.403,00 dan belanja langsung kegiatan sebesar Rp 4.409.501.050,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp 6.583.708.706,00 atau sebesar 92,40 %, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% realisasi
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Tidak Langsung	2.715.071.403	2.624.771.071	90.300.332	96,67
II	Belanja Langsung:	4.409.501.050	3.958.937.635	450.563.415	89,78

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tahun 2017 total anggaran adalah Rp 7.124.572.453,00 terbagi menjadi 62 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 6.583.708.706,00 atau 92,40% dari pagu anggaran.

Keseluruhan Realisasi per kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Gaji dan Tunjangan	2.049.153.403	1.993.781.908	97,29
Tambahan Penghasilan PNS	665.918.000	630.989.163	94,75
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.980.000	17.965.050	89,92
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	4.424.000	88,48
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000	57.275.675	95,46
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000	17.983.725	89,92
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000	2.840.000	94,67
Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000	11.998.500	99,99
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	6.000.000	100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	4.448.500	59,31
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.496.000	1.980.000	79,33
Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	10.278.800	85,66
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58.000.000	57.980.600	99,97
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.000.000	2.504.000	83,47
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	48.567.250	97,13
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000	7.512.500	93,91
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP SPAMS	89.550.000	80.212.000	89,57
Pendataan dan pembinaan Adat Istiadat	30.000.000	25.392.000	84,64
Anak Indonesia Menuju Damai	35.000.000	31.190.000	89,11
Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	497.929.500	478.931.950	96,18
Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa	198.127.500	186.811.500	94,29

Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	42.350.000	38.195.000	90,19
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	8.249.800	0	0,00
Fasilitasi bantuan peralatan TTG	115.000.000	111.360.800	96,84
Fasilitasi Pendamping Desa	75.000.000	73.561.800	98,08
Penyusunan dan Sosialisasi Perbub tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	55.000.000	48.810.000	88,75
Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan	84.000.000	78.893.300	93,92
Fasilitasi PMTAS SD/MI	10.000.000	7.235.000	72,35
Fasilitasi Kegiatan Usaha Bersama Komunitas	25.000.000	22.161.500	88,65
Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa	526.400.000	441.836.615	83,94
Fasilitasi Kelembagaan BKAD	99.250.000	93.742.670	94,45
Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	150.000.000	143.464.200	95,64
Bintek Penguatan Kapasitas KPMD	120.000.000	115.790.000	96,49
Fasilitasi dan pendampingan kawasan perdesaan berbasis pertanian	35.980.000	34.362.000	95,50
Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam Rangka Ketahanan Pangan	22.000.000	18.820.500	85,55
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Bantuan Keuangan Desa Berkembang	20.000.000	16.018.200	80,09
Pembinaan, Monitoring dan Bintek Lembaga Ekonomi Desa	100.000.000	90.710.900	90,71
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	99.000.000	95.087.500	96,05
Bulan Bhakti Gotong Royong	50.000.000	43.991.400	87,98
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	19.550.000	12.272.000	62,77
Fasilitasi Dana Transfer ke Desa	199.620.000	171.804.750	86,07
Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	48.810.000	30.396.000	62,27
Penilaian Kelayakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	19.325.000	11.282.000	58,38
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa	19.400.000	19.400.000	100,00

Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan	24.680.000	23.050.000	93,40
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	100.000.000	69.994.000	69,99
Pengembangan Potensi Unggulan Desa	60.000.000	55.770.000	92,95
Pendataan Awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan	36.000.000	35.735.000	99,26
Penguatan keuangan desa	85.000.000	82.915.000	97,55
Pengembangan sistem informasi desa (Ban-gub)	62.790.000	62.538.000	99,60
Pengembangan Website Subdomain Bapermades	5.000.000	2.826.000	56,52
Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	84.100.000	83.087.000	98,80
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	2.000.000	2.000.000	100,00
Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa	270.000.000	220.943.500	81,83
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan SisKeuDes	610.413.250	538.596.950	88,23
JUMLAH	7.124.572.453	6.583.708.706	92,41

Berkaitan dengan Belanja Langsung, ada kegiatan yang dikelola Dinpermades Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2017 yang tidak terealisasi yaitu kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dikarenakan tidak adanya tupoksi yang terkait kemiskinan yang tercantum pada nomenklatur baru Dinpermades.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah OPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Entitas akuntansi adalah Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannyadan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan OPD adalah Basis Akrual. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

Dalam Basis Akrual pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. beban dianggap telah terjadi jika suatu sumberdaya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena penggunaan tersebut. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan OPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

#### **4.3 Kebijakan Akuntansi Pos-Pos Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode..

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menyusun Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2017 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan Keuangan atas pelaksanaan Kegiatan di Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 dan PP PP No. 71 Tahun 2010, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam PP 71 tahun 2010 Pokok dari Laporan Keuangan terdiri dari:

##### **4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

#### Pendapatan-LRA

- (a) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
- (b) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (c) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (d) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### Belanja

- (a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

#### Transfer

- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Surplus/defisit-LRA;

- Merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

#### 4.3.2 Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

#### 4.3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat Laporan Operasional (LO) yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Beban

Beban diakui pada saat:

- (a) timbulnya kewajiban;
- (b) terjadinya konsumsi aset;
- (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3) Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4) Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

6) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

7) Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

4.3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

#### **4.4 Kebijakan Akuntansi Akrual**

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban Pemerintah Daerah pada suatu periode. Dengan demikian, Pemerintah Daerah akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hak ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

##### **a. Pendapatan**

Pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting.

Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

**b. Belanja**

Perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual adalah berubahnya Pengakuan Belanja menjadi Pengakuan Belanja dan Beban.

- 1) Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 4) Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

**c. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.

1) Pengakuan Persediaan

Pengakuan 'Persediaan' dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

2) Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

**d. Beban persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

**e. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan).

Klasifikasi Aset Tetap

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Bangunan dan Gedung;
- 4) Jalan, Jaringan, Instalasi;

5) Aset Tetap Lainnya (buku-buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian;

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap dapat diakui apabila :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

1) Aset donasi

Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

2) Pengakuan Aset dari Belanja Modal

Jika aset yang berasal dari Belanja Modal memiliki manfaat teknis lebih dari satu tahun, maka bisa diakui sebagai aset.

3) Penghapusan Aset Tetap tetap dilakukan jika Aset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku atau setelah ada Surat Keputusan Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Kabupaten Temanggung.

**f. Kewajiban**

Akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada laporan keuangan. Definisi Kewajiban.

**a. Pengakuan kewajiban**

Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang

**1) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

**2) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

**g. Ekuitas Dana**

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Dalam Basis Akrua istilah Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan Ekuitas dana cadangan dihapus, digantikan dengan Ekuitas.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

#### 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

##### 5.1.1 Penjelasan Laporan Neraca

###### A. ASET

###### ASET LANCAR

###### 1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :	2017	2016
	Rp	Rp
Kas dan Setara Kas	68.772.120	20.775.650
Jumlah	68.772.120	20.775.650

Kas dan setara kas tersebut di atas adalah sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinpermades per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 68.722.120,00 dan pajak yang belum disetor sebesar Rp 43.235.150,00

Pajak tahun 2017 yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 43.235.150,00. terdiri dari :

a. PPh 21	Rp.	35.555.900,00
b. PPh 22	Rp.	1.325.000,00
c. PPh 23	Rp.	3.544.500,00
d. PPN	Rp.	2.809.750,00 +
	Rp.	<u>43.235.150,00</u>

## 2. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka :		2017	2016
		Rp	Rp
-	Beban Pegawai dibayar dimuka	0	0
Jumlah Beban dibayar dimuka		0	0

Tidak ada beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2017

## 3. Persediaan

Persediaan :		2017	2016
		Rp	Rp
-	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.719.000	1.342.900
-	Persediaan Bahan/Material	0	0
-	Persediaan Barang Lainnya	0	0
Jumlah Persediaan		1.719.000	1.342.900

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Organisasi Perangkat Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2017 dan 2016, sebagai berikut:

Persediaan :		2017	2016
		Rp	Rp
a.	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.719.000	1.342.900
	- Persediaan Alat Tulis Kantor	1.029.000	644.500
	- Persediaan alat listrik dan elektronik	690.000	47.000
	- Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0	0
	- Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	11.400
	- Persediaan Barang Cetakan	0	640.000
b.	Persediaan Bahan/Material	0	0
	- Persediaan Bahan baku bangunan	0	0
	- Persediaan Bahan Lainnya	0	0
c.	Persediaan Barang Lainnya	0	0
	- Persediaan Barang Yang Akan diberikan/dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0
	- Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0	0
Jumlah Persediaan		1.342.900	2.146.100

## ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap :		2017	2016
		Rp	Rp
a.	Peralatan dan Mesin	1.419.698.750	1.363.641.500
b.	Gedung dan Bangunan	616.275.000	616.275.000
c.	Jaringan listrik	12.059.800	1.284.800
d.	Jaringan telepon	10.775.000	10.775.000
e.	Akumulasi Penyusutan	(1.379.109.075,84)	(1.379.109.075,84)
Jumlah Aset Tetap		668.924.474,16	612.867.224,16

Sedangkan mutasi Aset Tetap dalam TA 2017 sebesar Rp 73.959.800,00 Nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2017

Aktiva Tetap	Saldo 2016	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	0	0	0	0
Peralatan & Mesin	1.363.641.500	56.557.250	500.000	1.419.698.750
Gedung & Bangunan	616.275.000	0	0	616.275.000
Jaringan Listrik	1.284.800,00	0	0	1.284.800,00
Jaringan Telepon	10.775.000,00	0	0	10.775.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.379.109.075,84)	0	0	( 1.379.109.075,84)
Jumlah	612.867.224,16	56.557.250	500.000	668.924.474,16

Saldo akhir Aset Tetap TA 2017 sebesar Rp 668.924.474,16 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan dari belanja modal tahun 2017 sebesar Rp 56.557.250,00 dikurangi Rp 500.000,00 karena belanja modal barang ekstrakomptabel yang tidak termasuk aset tetap.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tanah

OPD tidak mempunyai aset berupa tanah alias Nihil.

## 2. Peralatan dan Mesin

Penilaian atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam rangka penyusunan neraca awal didasarkan pada Nilai Perolehan/Pembelian.

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp 668.924.474,16 dan Rp 612.867.224,16

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.419.698.750,00 karena adanya belanja modal sebesar Rp 56.557.250,00 serta pengurangan sebesar Rp 500.000,00 yang merupakan belanja barang ekstrakomtabel sebagai berikut:

No	Klasifikasi Aset	Saldo Awal/2016	Tambah	Kurang	Saldo 31 Des 2017
1	Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	809.287.000	0	0	809.287.000
2	Alat Kantor	33.605.000	2.490.000	0	36.095.000
3	Alat Rumah Tangga	163.700.000	20.367.250	0	184.067.250
4	Komputer	245.010.000	33.700.000	500.000	278.210.000
5	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	70.639.500	0	0	70.639.500
6	Alat Studio	18.450.000	0	0	18.450.000
7	Alat Komunikasi	21.450.000	0	0	21.450.000
8	Peralatan Pemancar	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>JUMLAH</b>		1.363.641.500	56.557.250	500.000	1.419.698.750

## 3. Gedung dan Bangunan

Penilaian atas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dalam rangka penyusunan neraca awal didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp 616.275.000,00 dan Rp 616.275.000,00.

## 4. Jaringan listrik

Saldo jaringan listrik per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 1.284.800,00.

## 5. Jaringan telepon

Saldo jaringan telepon per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sama masing masing sebesar Rp 10.775.000,00.

## 6. Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0

**ASET LAINNYA**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing masing Rp 2.156.100,00 terdiri dari saldo aset tidak berwujud dan aset rusak, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Aset Lainnya :		2017	2016
		Rp	Rp
a.	Aset Tidak Berwujud	0	0
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	253.200.000	253.200.000
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	253.200.000	253.200.000
b.	Aset Rusak	2.156.500	2.156.500
	Aset Rusak	113.449.500	113.449.500
	Akumulasi penyusutan aset rusak	111.293.000	111.293.000
	Jumlah Aset Lainnya	2.156.500	2.156.500

## B. KEWAJIBAN

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :		2017	2016
		Rp	Rp
a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.235.150	15.775.300
b.	Utang Bunga	0	0
c.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
d.	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
e.	Utang Belanja	60.075.650	35.098.600
f.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah kewajiban jangka pendek		103.310.800	50.873.900

#### Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 43.625.150,00 yaitu hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada Tahun 2017 dengan rincian :

a.	PPh 21	Rp.	35.555.900,00	
b.	PPh 22	Rp.	1.325.000,00	
c.	PPh 23	Rp.	3.544.500,00	
d.	PPN	Rp.	2.809.750,00	+
			Rp.	43.235.150,00

Utang belanja sebesar Rp 60.075.650 merupakan utang belanja tahun 2017 yang terdiri dari utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 58.792.800,00 dan utang belanja jasa kantor (telepon, air, listrik) bulan Desember sebesar Rp 1.282.850,00

### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang :		2017	2016
		Rp	Rp
a.	Utang Dalam Negeri		
b.	Utang Jangka Panjang Lainnya		
Jumlah kewajiban jangka pendek			

Tidak ada kewajiban jangka panjang

### C. EKUITAS

Ekuitas :		2017	2016
		Rp	Rp
a.	Ekuitas	-5.971.871.381,84	586.268.374,16
b.	Ekuitas SAL	0	0
c.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.609.195.676,00	0
Jumlah Ekuitas		637.324.294,16	586.268.374,16

Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 637.324.294,16 dan Rp 586.268.374,16.

#### 5.1.2 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

##### 1. PENDAPATAN

Tidak ada pendapatan

##### 2. BELANJA

Belanja meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2017 serta realisasi TA 2016 sebagai berikut :

Belanja Daerah :		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Belanja Operasi	7.066.572.453	6.527.151.456	4.428.874.193
b.	Belanja Modal	58.000.000	56.557.250	82.240.000
Jumlah		7.124.572.453	6.583.708.706	5.288.181.382

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2017 sebesar Rp 6.583.708.706,00 atau 92,40% dari anggaran sebesar Rp 7.124.572.453,00.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Belanja Pegawai :		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
-	Belanja Pegawai	3.456.150.403	3.294.836.071	2.861.211.697
-	Belanja Barang/Jasa	3.610.422.050	3.232.315.385	2.366.444.685
Jumlah Belanja Operasi		7.066.572.453	6.527.151.456	5.227.656.382

b. Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp 3.294.836.071,00 atau 95,33 % dari anggaran sebesar Rp 3.456.150.403,00

c. Belanja Barang/Jasa

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi TA 2016 sebesar Rp 3.232.315.385,00 atau 89,53 % dari anggaran sebesar Rp 3.610.422.050,00

d. Belanja Modal

Belanja Modal Dinpermades meliputi Belanja Peralatan dan Mesin dan belanja modal yang masuk barang ekstrakomptabel, dengan realisasi TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Belanja Modal :		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
-	Peralatan dan Mesin	58.000.000	56.557.250	60.525.000
Jumlah Belanja Modal		58.000.000	56.557.250	60.525.000

Realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp 56.557.250,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp 56.557.250,00 dan dari nilai realisasi tersebut yang

menambah nilai aset sebesar Rp 56.057.250,00 dan menjadi barang ekstrakomptabel sebesar Rp 500.000,00.

Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Kursi rapat	17	435.000	7.395.000
2	Filling Cabinet	3	2.490.000	2.490.000
3	PC HP Elite Desk 705 G2	1	7.100.000	7.100.000
4	PC Asus K20CE-IDOO4D	1	6.500.000	6.500.000
5	PC Asus /K31CD-ID007D	1	8.700.000	8.700.000
6	Laptop Asus	1	6.900.000	6.900.000
7	Printer Epson L360	1	2.350.000	2.350.000
8	Printer HP	1	1.650.000	1.650.000
9	Gorden	1	5.000.000	5.000.000
10	Televisi Samsung 32"	1	3.010.500	3.010.500
11	Televisi Samsung 40"	1	4.961.750	4.961.750
12	Flashdisk	4	95.000	380.000
13	Card reader	2	60.000	120.000
<b>JUMLAH</b>				56.557.250

### 5.1.3 Penjelasan Laporan Operasional

#### LAPORAN OPERASIONAL

##### Beban

##### Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa pada per 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.552.639.406,00 dengan perincian sebagai berikut :

##### Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.319.517.871,00

##### a. Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.233.121.535,00

**Surplus/Defisit dari operasi**

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan sebesar dimana tidak ada pendapatan sedangkan jumlah beban operasi sebesar

Rp 6.552.639.406,00,00 sehingga defisit operasi sebesar  
– Rp 6.552.639.406,00,00

**5.1.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAAS**

SKPD : 102070100-DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
Periode : 31-12-2017365

Keterangan	Jumlah	
Ekuitas Awal		586.268.374,16
Surplus Defisit LO	-6.552.639.406	
Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan	-5.500.350	
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	6.609.195.676	
Ekuitas Akhir		637.324.294,16

1. Ekuitas awal sebesar Rp 586.268.374,16, sedangkan defisit-LO atau realisasi pada tahun 2017 sebesar  
– Rp 6.552.639.406,00
2. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi sebesar - Rp 5.500.350,00 merupakan sisa UYHD tahun 2016 yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp 5.000.350,00 dan belanja modal yang tidak dicatat sebagai aset tetap, tetapi menjadi barang ekstrakomptabel sejumlah Rp 500.000,00 .
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD, mutasinya didapat dari seluruh transaksi STS dan SP2D serta Jurnal Memorial yang diperlukan selama 2017 sebesar Rp 6.609.195.676,00
4. Ekuitas akhir pada tahun 2017 adalah Rp 637.324.294,16

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dasar Hukum keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

#### 6.2 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Keuangan
  - b. Seksi Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa
  - a. Seksi Penguatan Kapasitas Lembaga Desa
  - b. Seksi Perkembangan Desa
  - c. Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Seksi Pemanfaatan SDA dan TTG
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
5. Bidang Pembangunan Desa
  - a. Seksi Keuangan Desa
  - b. Seksi Pembangunan Desa dan Swagotro
  - c. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Masyarakat

### **6.3 Setor Kas Daerah**

Sisa UYHD tahun 2017 yang disetor ke kas daerah melebihi tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 25.486.970,00 pada tanggal 24 Januari 2018 dikarenakan adanya koreksi SPJ dan adanya kesalahan perhitungan pengembalian UYHD pada akhir tahun 2017.

## **BAB VII PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK

ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2017. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2018

Kepala Dinpermades  
Kabupaten Temanggung

AGUS SARWONO,S.Sos,MM  
NIP.19660411 198607 1 001